|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE )**  **PERENCANAAN PENGELOLAAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN** | | | |
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : | Kementerian Kesehatan RI (024) |
| UNIT ESELON I/II | : | BPPSDMK/Pusren-Gun SDMK |
| PROGRAM | : | Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan |
| HASIL (OUTCOME) | : | Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan |
| KEGIATAN | : | Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan |
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | : | Tersusunnya Dokumen Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri |
| JENIS KELUARAN/OUTPUT | : | Dokumen Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri |
| VOLUME KELUARAN | : | 3 (tiga) |
| SATUAN UKUR KELUARAN | : | **Dokumen** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **LATAR BELAKANG** |  |  | |
|  | 1. Dasar Hukum |  | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 3890); |
|  |  |  | 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); |
|  |  |  | 1. Undang-Undang nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  |  |  | 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) |
|  |  |  | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
|  |  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); |
|  |  |  | 1. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; |
|  |  |  | 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; |
|  |  |  | 1. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan Dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara; |
|  |  |  | 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 850/Menkes/SK/V/XI/2001 tentang Kebijakan Pengembangan Nakes Tahun 2000-2010; |
|  |  |  | 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2. Gambaran Umum | Reformasi tatakelola tenaga kesehatan di Indonesia sangat penting dan sangat tepat waktu karena beberapa alasan. Pada bulan Juni 2007, dalam dengar pendapat Mahkamah Konstitusi, Ikatan Dokter Indonesia mengakui bahwa standar praktek profesi kedokteran belum ada. Membentuk dasar sistem kesehatan yang benar (tidak hanya masalah sumber daya manusia) sehingga sistem tersebut dapat berfungsi dengan lebih efektif merupakan prioritas utama dari program bantuan Australia, seperti yang ditetapkan pada Buku Putih 2006. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menetapkan bahwa hak terhadap kesehatan merupakan perwujudan dari kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.  Peningkatkan hasil sektor kesehatan Indonesia memerlukan penyelesaian terhadap dua tantangan utama terkait personil: kualitas dan distribusi. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh para profesional di bidang kesehatan sangat tergantung pada kualitas lembaga yang melatih dan memberikan sertifikasi kepada mereka. Persyaratan akrediatasi untuk lembaga pendidikan dan sertifikasi profesi, persyaratan posisi dalam konteks dinamika sistem desentralisasi pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Departemen Kesehatan. Masalah distribusi adalah bagaimana menyeimbangkan penawaran (praktisi medis) dan permintaan (kebutuhan dan harapan masyarakat) untuk memperbaiki ketidakseimbangan distribusi yang saat ini tidak menguntungkan bagi daerah pedesaan dan daerah terpencil khususnya  Meningkatkan jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan merupakan tantangan masa depan pembangunan kesehatan. Ketersedian tenaga kesehatan yang memadai adalah salah satu faktor pendukung percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang baik sebagai salah satu tujuan pembangunan kesehatan, serta mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (SJSN) dan pencapaian target MDG’s tahun 2015.  Situasi di daerah DTPK dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), serta daerah kurang diminati sangat berbeda dengan daerah lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana-prasarana merupakan masalah utama yang terjadi di lapangan. Namun demikian, aktifitas pelayanan wajib dilaksanakan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat ditunda. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan khusus untuk mengembangkan regulasi di lapangan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tidak menyamaratakan kebijakan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.  Kebijakan yang baru perlu diikuti dengan regulasi dan pedoman teknis untuk mendistribusikan tenaga kesehatan yang telah diperkaya kapasitasnya baik dari segi kompetensi/hard skill maupun soft skill khusus untuk DTPK, DBK, dengan berbagai variasi model distribusi. Pedoman teknis ini diperlukan untuk membantu stakeholder yang terkait dengan penempatan tenaga kesehatan untuk menentukan jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang akan dikirimkan ke daerah DTPK, DBK, dan daerah kurang diminati. Oleh sebab itu diperlukan tindak lanjut dengan mengimplementasikan policy paper yang telah dikembangkan di lapangan.  Sementara itu tantangan dari pendayagunaan tenaga kesehatan yang adil dan merata adalah sebagai berikut :   1. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan strategis di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Retensi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah DTPK/DBK dan/atau daerah yang tidak diminati 3. Kurangnya dukungan daerah terhadap tenaga kesehatan yang dikirim oleh pusat 4. Kebijakan pusat yang tidak mudah diterapkan di daerah karena adanya otonomi daerah. 5. Penempatan tenaga kesehatan yang belum mempertimbangkan karakteristik daerah dan dikaitkan dengan kompetensi tenaga kesehatan 6. Lemahnya monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kesehatan   Masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan distribusi saat ini karena belum adanya kebijakan khusus bagi distribusi tenaga kesehatan di DTPK, sehingga menimbul masalah seperti:   1. Adanya perbedaan ‘take home pay’ dari para tenaga kesehatan yang bekerja dalam satu tim. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang status kepegawaian seperti PNS, PTT, Penugasan Khusus, PTT Daerah, Tenaga Kontrak, dsb. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja. 2. Honor/insentif yang besarannya disamaratakan antara lokasi fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesnya mudah dengan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesnya sulit (baik di daerah terpencil/sangat terpencil). 3. Menurunnya kompetensi (hard skill) tenaga kesehatan yang bekerja di DTPK. 4. Meningkatnya kompleksitas kerja yang menuntut tambahan kewenangan tenaga kesehatan di luar kewenangan profesi utamanya. 5. Belum selarasnya hubungan antara pendidikan dengan pendayagunaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan tenaga kesehatan. | | |
| **B.** | | **PENERIMA MANFAAT** | | | |
| Penerima manfaat dari kegiatan distribusi SDM Kesehatan ini adalah :   1. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan. 2. Tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh Nusantara 3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Organisasi profesi bidang kesehatan. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| **C.** | | **STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN** | | | |
|  | | **1. Uraian Kegiatan** | Metode pelaksanaan kegiatan subbid Distribusi SDMK tahun 2015 adalah murni swakelola. Subbid Distribusi dalam menjalankan tugasnya meiliki fungsi sebagai penyusun dan pelaksana serta pengevaluasi kebijakan terkait Distribusi SDM kesehatan diseluruh wilayah Indonesia. Sesuai fungsi tersebut, subbid Distribusi akan menyusun beberapa dokumen pendayagunaan SDM kesehatan dalam negeri yang berupa pedoman distribusi nakes di DTPK, dokumen pemenuhan/penempatan nakes di fayankes milik pemda, dan pedoman pemantauan pemenuhan SDM kesehatan. Dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut, akan dilakasanakan kegiatan-kegiatan sebagai proses penyusunannya yaitu : Rapat-rapat persiapan, Advokasi, Pembahasan, Seminar, serta Koordinasi dan Konsultasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensip. | | |
| **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan** | 1. **Dokumen Perencanaan Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri**   Pada tahun 2015, kegiatan yang akan dilakukan untuk menghasilkan output berupa Dokumen Perencanaan Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :   1. *PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMENUHAN / PENEMPATAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA* 2. Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan   Rapat Persiapan Penyusunan dokumen rencana pemenuhan/penempatan nakes di fasyankes milik pemda akan dilaksanakan 1 kali yakni di kantor di luar jam kerja dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Sekretariat Badan PPSDMK 2. Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 5. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 6. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 8. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 9. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 10. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 11. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat persiapan dilaksanakan Pada Minggu pertama Bulan Maret Tahun 2015.  Penyusunan Laporan Kegiatan Rancangan Draft Pedoman Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 2 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 2 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 2 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 2 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 2 staf teknis 7. Kasubbag Tata Usaha Pusren-Gun SDMK beserta 2 orang staf 8. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Penyusunan Laporan dilaksanakan Pada Minggu ke-dua Bulan Juni Tahun 2015.   1. Penyusunan Dokumen   Penyusunan Dokumen rencana pemenuhan/penempatan nakes di fasyankes milik pemda dilaksanakan 4 kali yakni di kantor di luar jam kerja dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 5. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 6. Kabag Program dan Informasi Set Badan PPSDMK 7. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 8. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 9. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 10. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 11. Kasubbid Analisis Kebutuhan 12. Kasubbid Program dan Pelaporan 13. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 15. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 16. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 17. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Penyusunan dokumen rencana pemenuhan / penempatan nakes di fasyankes milik pemda dilaksanakan Pada Minggu pertama s/d minggu ke tiga Bulan Maret Tahun 2015.  Dalam rangka penyusunan dokumen juga dilaksanakan pembahasan dan pertemuan semisal seminar  Pembahasan dilaksanakan 2 kali dengan Fullday Meeting melibatkan 25 orang peserta yang sama dengan peserta Seminar kecuali peserta dari liuar daerah. Seminar penyusunan dokumen rencana penempatan/pemenuhan nakes di fasyankes milik pemda dilaksanakan sekali yakni di hotel selama sehari dengan jumlah peserta 37 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Dirjen Pemerintahan Umum KEMENDAGRI 5. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 6. Biro Organisasi KEMENDAGRI 7. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 8. Dinkes Prov Papua 9. Dinkes Prov Sumatera Utara 10. Dinkes Prov NTT 11. Dinkes Prov Kalimantan Selatan 12. BKD Prov Papua 13. BKD Prov Sumatera Utara 14. BKD Prov NTT 15. BKD Prov Kalimantan Selatan 16. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 17. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 18. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 19. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 20. Kasubbid Analisis Kebutuhan 21. Kasubbid Program dan Pelaporan 22. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 23. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 24. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 25. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 26. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Pembahsan dan Seminar dilaksanakan Pada Bulan April Tahun 2015.   1. Finalisasi   Pembahasan Finalisasi Dokumen rencana penempatan/pemenuhan nakes di fasyankes milik pemda dilaksanakan 2 kali di kantor di luar jam kerja dan sekali di hotel di wilayah jakarta dengan jumlah peserta 25 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 1 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 1 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Narasumber) dan 1 orang staf 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB (Narasumber) 5. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI (Moderator) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 9. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 10. Kasubbid Analisis Kebutuhan 11. Kasubbid Program dan Pelaporan 12. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 13. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 15. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 16. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Pembahasan akan dilaksanakan Pada Minggu pertama Bulan Mei Tahun 2015.   1. Sosialisasi   Pusren-Gun SDMK melalu subbid Analisis Kebutuhan setiap tahunnya menerbitkan rencana kebutuhan SDM kesehatan di setiap fasyankes seluruh Indonesia, maka subbid Distribusi menjalankan fungsinya untuk menyusun rencana pemenuhan/penempatan nakes di fasyankes berdasarkan dokumen rencana kebutuhan tersebut.  Agar teraplikasi dengan baik proses penempatan/pemenuhan nakes sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan rencana penempatan/pemenuhan, rencana pemenuhan tersebut harus dijadikan panduan oleh pemda dalam menempatkan nakesnya di fasyankes di lingkungan kerjanya.  Oleh karena itu diperlukan kesepahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai kata kesepahaman tersebut diperlukan sosialisi dokumen rencana pemenuhan nakes di fayankes milik pemda serta advokasi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas yang di dalamnya terdapat pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah sekitar 35 orang di setiap provinsi. Dengan rincian sebagai berikut :   1. Pusren-Gun SDMK : 3 orang 2. Dinkes Provinsi : 16 orang 3. Dinkes Kab/Kota : 1 x 4 kab/kota 4. BKD Provinsi : 4 orang 5. BKD Kab/Kota : 1 x 4 Kab/kota 6. Direktur RS : 2 orang 7. Asosiasi Profesi : 8 orang   Perjalanan dinas kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari bagi peserta pusat dan 2 hari bagi peserta dari kabupaten.  Pemerintah Daerah yang akan diadvokasi adalah :   1. Papua 2. Sumatera Utara 3. Nusa Tenggara Timur 4. Kalimantan Selatan   Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ke-tiga s/d ke-empat bulan Mei Tahun 2015.   1. *PENGEMBANGAN MANAJEMEN DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM NEGERI* 2. Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan   Rapat Persiapan Pembuatan aplikasi manajemen distribusi SDM kesehatan dalam negeri akan dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Sekretariat Badan PPSDMK 2. Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 5. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 6. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 8. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 9. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 10. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 11. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat persiapan dilaksanakan Pada Minggu pertama Bulan Maret Tahun 2015.  Penyusunan Laporan Kegiatan Pembuatan aplikasi manajemen Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Penyusunan Laporan dilaksanakan Pada Minggu ke-dua Bulan Oktober Tahun 2015.   1. Penyusunan dan Pembahasan   Penyusunan dan pembahasan dalam membuat konsep aplikasi dan dokumen manajemen distribusi SDM kesehatan dalam negeri harus dilakukan intensif agar tercipta aplikasi dan dokumen manajerial yang sempurna, penyusnan dan pembahasan dilaksanakan 8 kali di kantor (4 jam di luar jam kerja/kantor) dan 4 kali dengan fullday meeting dengan jumlah peserta 25-30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Pusat standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan 5. Tim ahli dalam pembuatan aplikasi manajemen distribusi SDM kesehatan dalam negeri (Narasumber) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 9. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 10. Kasubbid Analisis Kebutuhan 11. Kasubbid Program dan Pelaporan 12. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 13. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 15. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 16. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Penyusnan dan Pembahasan dilaksanakan Pada Bulan Maret s/d Bulan Juni Tahun 2015.  Selain dari pada itu juga direncanakan akan ada koordinasi/konsultasi linsek/linprog dalam maupun luar kota, yang waktu pelaksanaannya dalah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi.   1. Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Distribusi SDM Kesehatan   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan yakni :   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Distribusi SDM Kesehatan 2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Distribusi SDM Kesehatan 3. Penyusunan Dokumen Pemantauan Distribusi SDM Kesehatan 4. Pembuatan Aplikasi Manajemen Distribusi SDMK   Semua subkegiatan tersebut akan dipihakketigakan dengan memanfaatkan jasa konsultansi dari penyedia yang memenuhi kriteria/syarat.  Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi yang dapat membantu dan mepermudah proses manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) distribusi SDM kesehatan di indonesia.   1. Uji coba aplikasi   Uji coba penggunaan aplikasi manajemen distribusi SDM kesehatan dalam negeri harus dilakukan dahulu agar apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan agar segera disempurnakan, uji coba dilaksanakan 2 kali yakni di kantor (4 jam di luar jam kerja/kantor) dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Narasumber) 4. Pusat standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan 5. Tim ahli dalam pembuatan aplikasi manajemen distribusi SDM kesehatan dalam negeri (Narasumber) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Pejabat struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Pusren-Gun SDM Kesehatan 8. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Pelaksanaan uji coba pada minggu pertama bulan oktober 2015.   1. **Dokumen Pelaksanaan Distribusi SDM Kesehatan dalam Negeri** 2. *PENYEMPURNAAN PEDOMAN DISTRIBUSI NAKES DI DTPK* 3. Rapat Persiapan   Rapat Persiapan Review Pelaksanaan Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri dilaksanakan 2 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 25 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Tim ahli dalam penyusunan pedoman distribusi 2 orang 3. Perwakilan dari BUKD 2 orang 4. Perwakilan dari Ropeg 2 orang 5. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 8. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 9. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 10. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat persiapan dilaksanakan Pada Minggu ke empat Bulan Mei Tahun 2015.   1. Pembahasan   Pembahasan Pedoman Distribusi nakes di DTPK harus dilakukan intensif agar tercipta pedoman yang sempurna, pembahasan dilaksanakan 5 kali yakni di kantor 2 kali (di luar jam kerja) dan di hotel 3 kali dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Dirjen Pemerintahan Umum KEMENDAGRI 5. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 6. Biro Organisasi KEMENDAGRI 7. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 8. Tim ahli dalam penyusunan pedoman distribusi nakes di DTPK (Narasumber) 9. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 10. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 11. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 12. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 13. Kasubbid Analisis Kebutuhan 14. Kasubbid Program dan Pelaporan 15. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 16. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 17. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 18. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 19. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Pembahasan dilaksanakan Pada Minggu pertama s/d ke tiga Bulan Juni Tahun 2015.  Selain dari pada itu juga direncanakan akan ada koordinasi/konsultasi linsek/linprog dalam maupun luar kota, yang waktu pelaksanaannya dalah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi.   1. Seminar   Seminar pedoman distribusi nakes di DTPK dilaksanakan sekali yakni di hotel selama sehari dengan jumlah peserta 42 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Dirjen Pemerintahan Umum KEMENDAGRI 5. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 6. Biro Organisasi KEMENDAGRI 7. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 8. Dinas Kesehatan Kab Alor 9. Dinas Kesehatan Kab Toli-toli 10. Dinas Kesehatan Kab Kep. Meranti 11. Dinas Kesehatan MTB 12. BKD Kab Alor 13. BKD Kab Toli-toli 14. BKD Kab Kep. Meranti 15. BKD MTB 16. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 17. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 18. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 19. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 20. Kasubbid Analisis Kebutuhan 21. Kasubbid Program dan Pelaporan 22. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 23. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 24. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 25. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 26. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Seminar dilaksanakan Pada Minggu ke empat Bulan Juni Tahun 2015.   1. Penyusunan Laporan   Penyusunan Laporan Kegiatan Penyempurnaan Pedoman Distribusi Nakes di DTPK dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 20 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Penyusunan laporan dilaksanakan Pada Minggu pertama Bulan Juli Tahun 2015.   1. *PENYUSUNAN PEDOMAN PENEMPATAN NAKES STRATEGIS* 2. Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan   Rapat Persiapan Penyusunan Pedoman Penempatan Nakes Strategis dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Sekretariat Badan PPSDMK 2. Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 5. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 6. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 8. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 9. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 10. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 11. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat Persiapan dilaksanakan Pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2015.  Penyusunan Laporan Kegiatan Penyusunan Pedoman Penempatan Nakes Strategis dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Penyusunan Laporan dilaksanakan pada minggu pertama Bulan Agustus 2015.   1. Penyusunan Draft Pedoman   Penyusunan Draft Pedoman dilaksanakan 6 kali di kantor di luar jam kerja, dan 3 kali dengan paket meeting dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Asosiasi Dinas Kesehatan 4. Asosiasi pemerintah provinsi 5. Asosiasi pemerintah kabupaten 6. Asosiasi Rumah Sakit 7. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 8. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 9. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 10. Kabag Program dan Informasi Set Badan PPSDMK 11. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 12. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 13. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 14. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 15. Kasubbid Analisis Kebutuhan 16. Kasubbid Program dan Pelaporan 17. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 18. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 19. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 20. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 21. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Penyusunan Pedoman Penempatan Nakes Strategis dilaksanakan Pada Bulan Mei s/d Bulan Juni Tahun 2015.   1. Finalisasi   Pembahasan Finalisasi Pedoman Penempatan Nakes Strategis dilaksanakan 2 kali di kantor di luar jam kerja dan sekali di hotel di wilayah jakarta dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 1 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 1 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Narasumber) dan 1 orang staf 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB (Narasumber) 5. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI (Moderator) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 9. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 10. Kasubbid Analisis Kebutuhan 11. Kasubbid Program dan Pelaporan 12. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 13. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 15. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 16. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Pembahasan akan dilaksanakan Pada Minggu ke Tiga Bulan Juni Tahun 2015.   1. Sosialisasi   Agar dapat terlaksana serta diterapkan dengan baik proses penempatan/pemenuhan nakes strategis sesuai dengan pedoman penempatan nakes strategis yang telah disusun maka diperlukan sosialisi pedoman tersebut serta advokasi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas yang di dalamnya terdapat pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah sekitar 35 orang di setiap provinsi. Dengan rincian sebagai berikut :   1. Pusren-Gun SDMK : 3 orang 2. Dinkes Provinsi : 16 orang 3. Dinkes Kab/Kota : 1 x 4 kab/kota 4. BKD Provinsi : 4 orang 5. BKD Kab/Kota : 1 x 4 Kab/kota 6. Direktur RS : 2 orang 7. Asosiasi Profesi : 8 orang   Perjalanan dinas kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari bagi peserta pusat dan 2 hari bagi peserta dari kabupaten.  Pemerintah Daerah yang akan disosialisasikan dan diadvokasi belum dapat ditentukan sekarang namun akan disesuaikan dengan kriteria prioritas.  Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2015.   1. *PENYUSUNAN PEDOMAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS PASKA PPDSBK* 2. Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan   Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Penyusunan Pedoman penempatan dokter spesialis paska PPDS dilaksanakan masing-masing 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Sekretariat Badan PPSDMK 2. Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 5. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 6. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 8. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 9. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 10. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 11. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat Persiapan dilaksanakan Pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2015.  Selain dari pada itu juga direncanakan akan ada koordinasi/konsultasi linsek/linprog dalam maupun luar kota, yang waktu pelaksanaannya dalah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi.  Penyusunan Laporan dilaksanakan pada minggu pertama Bulan Juli 2015.   1. Penyusunan Draft Pedoman   Penyusunan Draft Pedoman dilaksanakan 6 kali di kantor di luar jam kerja, dan 3 kali dengan paket meeting dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Asosiasi Dinas Kesehatan 4. Asosiasi pemerintah provinsi 5. Asosiasi pemerintah kabupaten 6. Asosiasi Rumah Sakit 7. Oragnisasi Profesi Dokter Spesialis 8. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 9. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 10. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 11. Kabag Program dan Informasi Set Badan PPSDMK 12. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 13. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 14. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 15. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 16. Kasubbid Analisis Kebutuhan 17. Kasubbid Program dan Pelaporan 18. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 19. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 20. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 21. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 22. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Penyusunan Pedoman penempatan dokter spesialis paska PPDS dilaksanakan Bulan Mei s/d Bulan Juli Tahun 2015.   1. Finalisasi   Pembahasan Finalisasi Pedoman penempatan dokter spesialis paska PPDS dilaksanakan 2 kali di kantor di luar jam kerja dan sekali di hotel di wilayah jakarta dengan jumlah peserta 25-30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 1 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 1 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Narasumber) dan 1 orang staf 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB (Narasumber) 5. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI (Moderator) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 9. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 10. Kasubbid Analisis Kebutuhan 11. Kasubbid Program dan Pelaporan 12. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 13. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 15. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 16. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Pembahasan akan dilaksanakan Pada Minggu ke Tiga Bulan Agustus Tahun 2015.   1. Sosialisasi   Agar dapat terlaksana serta diterapkan dengan baik proses penempatan/pemenuhan para dokter spesialis paska PPDSBK sesuai dengan pedoman yang telah disusun, maka diperlukan sosialisi pedoman tersebut serta advokasi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas yang di dalamnya terdapat pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah sekitar 35 orang di setiap provinsi. Dengan rincian sebagai berikut :   1. Pusren-Gun SDMK : 3 orang 2. Dinkes Provinsi : 16 orang 3. Dinkes Kab/Kota : 1 x 4 kab/kota 4. BKD Provinsi : 4 orang 5. BKD Kab/Kota : 1 x 4 Kab/kota 6. Direktur RS : 2 orang 7. Asosiasi Profesi / OP : 8 orang   Perjalanan dinas kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari bagi peserta pusat dan 2 hari bagi peserta dari kabupaten.  Pemerintah Daerah yang akan disosialisasikan dan diadvokasi belum dapat ditentukan sekarang namun akan disesuaikan dengan kriteria prioritas.  Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2015.   1. *PELAKSANAAN UJI COBA DISTRIBUSI NAKES DENGAN TEAM BASE*   Pada tahun 2012-2013 Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri yakni Sub Bidang Distribusi SDM Kesehatan telah menyusun ‘policy paper’ tentang pola distribusi sesuai dengan karakteristik daerah. Model-model distribusi tersebut meliputi model kontrak individu sepeti PTT dan penugasan khusus, model kontrak tim dan kontrak manajemen antara pemerintah-pemerintah, pemerintah-swasta.  Pada tahun 2014 telah dilakukan uji coba penempatan Nakes dengan Model Tim tahap 1 di 4 lokasi. Tenaga kesehatan yang menjadi anggota tim adalah dokter, perwat, bidan, sanitarian, gizi, atau apoteker/farmasi.  Pada tahun 2015 akan dilakukan Uji coba tahap ke 2. Daerah yang menjadi lokasi uji coba tahap ke 2 adalah Provinsi NTT (Kabupaten Alor), Prov. Riau (Kab. Kep. Meranti) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli). Kegiatan ini akan dipihak-ketigakan dengan memanfaatkan jasa konsultan melalui ULP Badan PPSDM Kesehatan.  Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :   1. Penyempurnaan Pedoman Penempatan Nakes dengan Model Tim (Tim Base) selama 2 bulan pertama 2. Kajian literatur (Jakarta) 3. Kajian lapangan (NTT, Riau dan Sulteng) 4. Pembahasan pedoman (Jakarta) 5. Workshop (Jakarta) 6. Penyempurnaan pedoman (Jakarta) 7. Pelatihan Bagi Nakes Tim Base selama 1 minggu pada bulan ke-tiga 8. Persiapan (Jakarta) 9. Pelaksanaan pelatihan pra penempatan (Jakarta) 10. Pelaporan (Jakarta) 11. Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Nakes dengan Tim Base selama 3 bulan 12. Seleksi dan rekrutmen (NTT, Riau dan Sulteng, atau Jakarta) 13. Pemberangkatan dan pembekalan (dari Jakarta ke NTT, Riau dan Sulteng) 14. Pelaksanaan (NTT, Riau dan Sulteng) 15. Pelaporan berkala.   Uji Coba akan dilaksanakan bulan April s/d bulan November Tahun 2014  Penyusunan Laporan dilaksanakan Pada Bulan Desember Tahun 2015.   1. **Dokumen Pemantauan Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri**   Pada tahun 2015, kegiatan yang juga akan dilaksanakan untuk mencapai Dokumen Pemantauan Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :   1. *PENYUSUNAN PEDOMAN PEMANTAUAN PEMENUHAN SDM KESEHATAN* 2. Rapat Persiapan dan Penyusunan Laporan   Rapat Persiapan dan Penyusnan Laopran Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemantauan Pemenuhan SDM Kesehatan dilaksanakan masing-masing 1 kali yakni di kantor di luar jam kerja dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Sekretariat Badan PPSDMK 2. Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 5. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 6. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 8. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 9. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 10. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 11. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat Persiapan dilaksanakan Pada Minggu ke Tiga Bulan Juni Tahun 2015.  Selain dari pada itu juga direncanakan akan ada koordinasi/konsultasi linsek/linprog dalam maupun luar kota, yang waktu pelaksanaannya dalah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi.  Penyusunan Laporan dilaksanakan pada minggu pertama september 2015.   1. Penyusunan Draft Pedoman   Penyusunan Draft Pedoman dilaksanakan 6 kali di kantor di luar jam kerja, dan 3 kali dengan paket meeting dengan jumlah peserta 30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Asosiasi Dinas Kesehatan 4. Asosiasi pemerintah provinsi 5. Asosiasi pemerintah kabupaten 6. Asosiasi Rumah Sakit 7. Oragnisasi Profesi Dokter Spesialis 8. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 9. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 10. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 11. Kabag Program dan Informasi Set Badan PPSDMK 12. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 13. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 14. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 15. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 16. Kasubbid Analisis Kebutuhan 17. Kasubbid Program dan Pelaporan 18. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 19. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 20. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 21. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 22. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Penyusunan Pedoman Pemantauan Pemenuhan SDM Kesehatan dilaksanakan Pada Bulan Juli s/d Bulan Agustus Tahun 2015.   1. Finalisasi   Pembahasan Finalisasi Pedoman Pemantauan Pemenuhan SDM Kesehatan dilaksanakan 2 kali di kantor di luar jam kerja dan sekali di hotel di wilayah jakarta dengan jumlah peserta 25-30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 1 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 1 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Narasumber) dan 1 orang staf 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB (Narasumber) 5. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI (Moderator) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 9. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 10. Kasubbid Analisis Kebutuhan 11. Kasubbid Program dan Pelaporan 12. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 13. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 15. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 16. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Pembahasan akan dilaksanakan Pada Minggu ke Tiga Bulan Agustus Tahun 2015.   1. Sosialisasi   Proses manajemen tidaklah lengakap tanpa adanya proses pemantauan. Maka diperlukan pelaksanaan pemantauan terhadap rencana pemenuhan nakes di seluruh fasyankes yang ada. Agar dapat terlaksana dengan baik proses pemantauan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah disusun, maka diperlukan sosialisi pedoman yang telah disusun serta advokasi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas yang di dalamnya terdapat pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah sekitar 35 orang di setiap provinsi. Dengan rincian sebagai berikut :   1. Pusren-Gun SDMK : 3 orang 2. Dinkes Provinsi : 16 orang 3. Dinkes Kab/Kota : 1 x 4 kab/kota 4. BKD Provinsi : 4 orang 5. BKD Kab/Kota : 1 x 4 Kab/kota 6. Direktur RS : 2 orang 7. Asosiasi Profesi / OP : 8 orang   Perjalanan dinas kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari bagi peserta pusat dan 2 hari bagi peserta dari kabupaten.  Pemerintah Daerah yang akan disosialisasikan dan diadvokasi belum dapat ditentukan sekarang namun akan disesuaikan dengan kriteria prioritas.  Pemantauan akan dilaksanakan Pada Bulan September Tahun 2015.   1. *PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMENUHAN / PENEMPATAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA* 2. Rapat Persiapan   Rapat Persiapan Penyusunan Pedoman Pemantauan Pemenuhan SDM Kesehatan dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 20 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat Persiapan dilaksanakan Pada Minggu ke Dua Bulan September Tahun 2015.   1. Pelaksanaan Pemantauan   Pusren-Gun SDMK melalui subbid Analisis Kebutuhan setiap tahunnya menerbitkan rencana kebutuhan SDM kesehatan di setiap fasyankes seluruh Indonesia, maka subbid Distribusi menjalankan fungsinya untuk mengevaluasi pemenuhan/penempatan nakes di fasyankes berdasarkan dokumen rencana kebutuhan tersebut.  Dengan dokumen rencana kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah akan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan ke BKN/Kementerian PAN-RB yang sesuai standar dari Kemenkes dengan harapan pemenuhan nakes di wilayah pemeda tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Ataupun apabila Pemda memiliki metode penentuan kebutuhan tenaga sendiri, maka seyogyanya pemenuhan nakes di wilyahanya dapat terlaksana dengan baik pula.  Oleh karena itu diperlukan evaluasi pelaksana kebijakan dalam pemenuhan nakes di fasyankes masing-masing daerah. Apakah pemenuhan nakes sudah sesuai dengan rencana kebutuhan ?. dan apakah pemenuhan nakes yang dilaksanakan oleh pemda sudah menjawab kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik secara penuh maupun berkala.  Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas yang di dalamnya terdapat pertemuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah sekitar 35 orang di setiap provinsi. Dengan rincian sebagai berikut :   1. Pusren-Gun SDMK : 3 orang 2. Dinkes Provinsi : 12 orang 3. Dinkes Kab/Kota : 1 x 5 kab/kota 4. BKD Provinsi : 2 orang 5. BKD Kab/Kota : 1 x 5 Kab/kota 6. Direktur RS : 2 orang 7. Asosiasi Profesi : 8 orang   Perjalanan dinas kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari bagi peserta pusat dan 2 hari bagi peserta dari kabupaten.  Pemerintah Daerah yang akan diadvokasi adalah :   1. Sulawesi Utara 2. Riau 3. Sumatera Utara 4. Nusa Tenggara Timur 5. Kalimantan Selatan (Opsional)   Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ke-tiga s/d ke-empat bulan Maret Tahun 2015.   1. Pembahasan/Analisa Hasil Pemantauan   Setelah dilaksanakan pemantauan pelaksanaan pemenuhan nakes berdasarkan rencana kebutuhan di pemda, maka diperlukan pembahasan pada lintas kementerian terkait, apabila terdapat kendala maka akan disusun rencana tindak lanjut.  Peserta yang akan terlibat dalam pembahasan hasil pemantauan adalah sejumlah 30 orang yang merupakn perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 5. Kepala Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 6. Kepala Badan Kepegawain Negara 7. Kabag Program dan Informasi Set Badan PPSDMK 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 9. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 10. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 11. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 12. Kasubbid Analisis Kebutuhan 13. Kasubbid Program dan Pelaporan 14. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 15. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 16. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 17. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 18. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri (9 orang)   Pembahasan akan dilaksanakan 3 kali di Gedung BPPSDMK di luar jam kerja dan 4 kali Fullday di Hotel di wilayah Jakarta.  Rencana pelaksanaan pembahsan pada minggu ke-dua oktober s/d minggu pertama November 2015  Selain dari pada itu juga direncanakan akan ada koordinasi/konsultasi linsek/linprog dalam maupun luar kota, yang waktu pelaksanaannya dalah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi.   1. Penyusunan Laporan   Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Pemenuhan SDM Kesehatan dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 20 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Penyusunan Laporan dilaksanakan pada minggu ke-dua November 2015.   1. *EVALUASI PELAKSANAAN UJI COBA PENEMPATAN NAKES DENGAN TEAM BASE YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2014* 2. Rapat Persiapan   Rapat Persiapan evaluasi pelaksanaan uji coba penempatan nakes dengan team base dan uji coba pelaksanaan taskshifting dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 20 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Rapat Persiapan dilaksanakan Pada Minggu ke Tiga Bulan Juni Tahun 2015.   1. Pembahasan   Pembahasan-pembahasan terkait evaluasi pelaksanaan uji coba penempatan nakes dengan team base dan uji coba pelaksanaan taskshifting dilaksanakan 6 kali yakni di kantor (4 jam di luar jam kerja/jam kantor) dan 3 kali Fullday Meeting dengan jumlah peserta 25-30 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 1 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 1 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Narasumber) dan 1 orang staf 4. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB (Narasumber) 5. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI (Moderator) 6. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri (Moderator) 7. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 8. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 9. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 10. Kasubbid Analisis Kebutuhan 11. Kasubbid Program dan Pelaporan 12. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 13. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 14. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 15. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 16. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Pembahasan akan dilaksanakan Pada Minggu ke Tiga Bulan Agustus Tahun 2015.   1. Seminar   Seminar evaluasi pelaksanaan uji coba penempatan nakes dengan team base dan uji coba pelaksanaan taskshifting dilaksanakan sekali yakni di hotel selama sehari dengan jumlah peserta 42 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Dirjen Otonomi Daerah II KEMENDAGRI (Narasumber) dan 2 orang staf 2. Kepala Biro Kepegawaian KEMENKES (Narasumber) dan 2 orang staf 3. Kepala Pusren-Gun SDM Kesehatan (Moderator) 4. Dirjen Pemerintahan Umum KEMENDAGRI 5. Depiuti SDM Aparatur KEMENPAN-RB 6. Biro Organisasi KEMENDAGRI 7. Biro Kepegawaian KEMENDAGRI 8. Dinkes Kabupaten Mertauke dan Kepala Puskesmas 9. Dinkes Kabupaten MTB dan Kepala Puskesmas 10. Dinkes Kabupaten Sambas dan Kepala Puskesmas 11. Dinkes Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Puskesmas 12. 6Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 13. Kabid Perencanaan SDM Kesehatan 14. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Luar Negeri 15. Kasubbag TU Pusren-Gun SDMK 16. Kasubbid Analisis Kebutuhan 17. Kasubbid Program dan Pelaporan 18. Kasubbid Pengembangan SDM Kes 19. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia 20. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri 21. Kasubbid Distribusi SDM Kes. 22. Staf Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri   Seminar dilaksanakan Pada Minggu ke-empat Bulan Agustus Tahun 2015.   1. Penyusunan Laporan   Penyusunan Laporan Kegiatan evaluasi pelaksanaan uji coba penempatan nakes dengan team base dan uji coba pelaksanaan taskshifting dilaksanakan 1 kali yakni di kantor dengan jumlah peserta 20 orang yang merupakan perwakilan dari :   1. Kabid Pendayagunaan SDM Kes Dalam Negeri 2. Kasubbid Analisis Kebutuhan beserta 1 staf teknis 3. Kasubbid Program dan Pelaporan beserta 1 staf teknis 4. Kasubbid Pengembangan SDM Kes beserta 1 staf teknis 5. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Asing di Indonesia beserta 1 staf teknis 6. Kasubbid Pendayagunaan SDM Kes Indonesia ke Luar Negeri beserta 1 staf teknis 7. Kasubbid Distribusi SDM Kes dan 8 Staf Subbid Distribusi SDM Kes.   Penyusunan Laporan dilaksanakan pada minggu pertama september 2015. | | |
| **D.** | | **KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian keluaran yakni Dokumen Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, selama 1 tahun anggaran (Januari-Desember 2015). | | | |
| **E.** | **BIAYA YANG DIPERLUKAN** | | |  |
|  | Total biaya/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dalam rangka Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam negeri untuk menghasilkan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Distribusi SDM Kesehatan Dalam Negeri adalah sebesar **Rp. 7.179.405.000,-** | | | |
|  | *(Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Emapt Ratus Lima Ribu Rupiah)* | | | |

Jakarta, September 2014

Kepala Bidang Pendayagunaan

SDM Kesehatan Dalam Negeri

Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed

NIP 196107231985032001